



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 8, No. 1 Tahun 2025

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v8i1.30860>

Pandangan Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap Genosida Israel atas Palestina Tahun 2023

Putri Yasmin Martsela

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia
putriyasminmartsela@gmail.com

Ramdhan Muhaimin

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia
ramdhan.muhaimin@uai.ac.id

Submitted: February 01st, 2025

Revised: July 07th, 2025

Accepted: July 09th, 2025

Abstract

Genocide should not be committed by any country. Genocide not only takes human lives on a massive scale, but also causes complex humanitarian crises. Such is the genocide experienced by the Palestinian people at the hands of Israel. What has been happening in Palestine since October 2023 has drawn international reactions, including from Saudi Arabia. This has prompted the author to examine Saudi Arabia's foreign policy towards Israel's genocide against Palestine. Based on the above statement, the research question raised is: How has Saudi Arabia's foreign policy toward Israel's genocide against Palestine evolved, particularly since the Tufan Al-Aqsa of 2023? To address this question, the author employs John Lovell's theory of foreign policy. The author adopts a qualitative method, utilizing data collection techniques through literature review sourced from books, journals, or other relevant and authoritative readings. Based on the research findings, Saudi Arabia has interests aligned with the Saudi Vision 2030, as well as its role as the face of the Muslim world in the Middle East and as an ally of the United States, striving to become a wise and cautious decision-maker. The foreign policy stance of Saudi Arabia toward the issue in Palestine is closely tied to the Saudi Vision 2030.

Keywords: Foreign Policies, Israel, Palestine, Saudi Arabia, Strategies

Abstrak

Genosida tidak seharusnya dilakukan oleh negara manapun. Genosida tidak saja menghilangkan nyawa manusia secara massif, tapi juga krisis kemanusiaan kompleks. Demikian genosida yang dialami bangsa Palestina oleh Israel. Apa yang berlangsung di Palestina sejak Oktober 2023 tersebut mengundang reaksi dunia internasional, termasuk Arab Saudi. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji politik luar negeri Arab Saudi terhadap genosida Israel terhadap Palestina. Mengacu pada pernyataan di atas, rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap genosida Israel atas Palestina terutama sejak Tufan Al Aqsha 2023? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan teori politik luar negeri dari John Lovell. Penulis memilih metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal atau bacaan lainnya yang relevan dan otoritatif. Berdasarkan hasil penelitian Arab Saudi memiliki kepentingan Saudi Vision 2030 serta sebagai wajah negara Muslim dari Timur Tengah dan sekutu Amerika Serikat mencoba untuk menjadi pemimpin pengambil keputusan dengan sangat bijaksana dan hati-hati. Bahwa sikap politik luar negeri Arab Saudi terhadap persoalan di Palestina sangat berkaitan dengan Saudi Vision 2030.

Kata kunci: Arab Saudi, Israel, Palestina, Politik Luar Negeri, Strategi

Pendahuluan

Sejak operasi Tufan Al-Aqsa pejuang Harakah Al-muqawwamah Al-Islamiyah (Hamas) pada 7 Oktober 2023 yang dibalas serangan brutal militer Israel (Salem, 2024), jumlah korban tewas penduduk Gaza menembus 42 ribu orang dengan dominasi perempuan dan anak-anak (East, 2024). Belasan ribu orang lainnya dinyatakan hilang yang kemungkinan masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Sementara korban luka menembus 100 ribu orang lebih (East, 2024). Tingkat kerusakan yang terjadi di Gaza saat ini merupakan yang terparah sepanjang 77 tahun kolonisasi Israel atas Palestina (Agencies, 2024). Tidak ada bangunan yang selamat dari target rudal-rudal Israel. Bahkan Jepang, dimana wilayahnya pernah hancur akibat nuklir pada Perang Dunia Kedua, pejabatnya menyebutkan kapasitas bom yang dijatuhkan Israel di Gaza jauh melampaui bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 (Zarni, 2024).

Episode tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina saat ini mendapatkan perhatian yang sangat luas dari masyarakat internasional, satu hal yang sangat

membedakan dari sikap dunia terutama pasca peristiwa Mavi Marmara tahun 2010 silam (Migdalovitz, 2011). Berbagai aksi mulai dari demonstrasi damai hingga pemboikotan terhadap afiliasi Israel terjadi di berbagai negara. Menariknya, aksi-aksi solidaritas Palestina tersebut justru lebih kuat bermunculan di Barat (Eropa, Amerika Utara, hingga Amerika Latin). Belakangan, sejumlah negara Eropa yang selama ini dikenal sebagai pendukung Israel, seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Norwegia, hingga Italia dan Inggris menarik dukungannya terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan berbalik mengecam Israel (The Conversation, 2024). Dukungan atas Palestina sebagai negara merdeka di sidang-sidang Majelis Umum PBB meningkat tajam (Al Jazeera News, 2024). Afrika Selatan bahkan melaporkan Netanyahu sebagai penjahat perang ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag, Belanda (Al Jazeera, 2024b).

Dunia Islam melalui OKI dan Liga Arab turut mengecam genosida Israel di Palestina (A. Rahman, 2024). Kedua organisasi tersebut mendesak agar melakukan gencatan senjata permanen dan menyerukan semua anggotanya yang memiliki hubungan diplomatik untuk memberi sanksi terhadap Israel (A. Rahman, 2024). Baik OKI maupun Liga Arab menggelar lebih dari sekali pertemuan tingkat tinggi darurat untuk merespons sikap Israel. Namun seperti sebelumnya dan juga sebagaimana terhadap PBB, setiap resolusi yang dikeluarkan organisasi internasional tersebut diabaikan Israel (Federation, 2024).

Arab Saudi adalah salah satu negeri Muslim yang memiliki stabilitas politik dan ekonomi lebih baik dibandingkan negara Muslim lainnya di kawasan. OKI yang didirikan dengan tujuan awal pembebasan Baitul Maqdis tahun 1969 menempatkan sekretariatnya di Jeddah, Arab Saudi (Organisation of Islamic Cooperation, n.d.). Hal tersebut disebabkan kedudukan Arab Saudi menjadi kiblat dunia Islam karena terletaknya Tanah Suci dan dua masjid utama umat Islam, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga secara teoritis, seharusnya pembebasan Masjidil Aqsa atau

Baitul Maqdis bukanlah hal yang sulit. Namun genosida yang berlangsung berulang di bumi Palestina selalu saja tidak dapat dihentikan.

Arab Saudi melalui putra mahkota Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk serangan-serangan Israel terhadap Palestina (Khalil Hafsa, 2024). Namun saat bersamaan, Arab Saudi masih mempertahankan status terorisme terhadap kelompok Hamas di Gaza (Greene Miller, 2023). OKI memang berkedudukan di Arab Saudi, namun gaung pembelaan terhadap Palestina lebih banyak terdengar dari Iran dan Turki yang secara geopolitik saling berseberangan. Meskipun ketiga negara tersebut sama-sama anggota OKI. Sementara itu di sisi lain, Arab Saudi memiliki proyek raksasa yang disebut Saudi Vision 2030 sebagai strategi besar (grand strategy) pembangunan politik, sosial, dan ekonomi negeri Muslim terbesar di Asia Barat tersebut. Bagaimana sesungguhnya politik luar negeri dan kepentingan Arab Saudi terhadap Palestina? Serta apakah Saudi Vision 2030 yang dicanangkan memberi atensi terhadap persoalan di Palestina?.

Sikap negara-negara Arab terhadap penjajahan yang terjadi di Palestina sudah lama menjadi perhatian peneliti dan akademisi. (Khalidi, 2020) dalam "The Hundred Years' War on Palestine", melihat umumnya negara Arab menggunakan isu Palestina sebagai alat mobilisasi politik domestik pasca Perang Dunia II. Pada saat bersamaan, mereka gagal membentuk kebijakan kolektif yang konsisten untuk mendukung pembebasan Palestina. Padahal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) didirikan karena pembakaran Israel di Masjid Al Aqsha. Khalidi menegaskan kegagalan tersebut berpangkal pada konflik antar-negara Arab sendiri, serta ketergantungan ekonomi dan militer mereka pada kekuatan Barat yang membentuk mereka dalam sejarahnya.

Senada dengan hal itu namun lebih spesifik kepada Arab Saudi, (Al-Rasheed, 2021) dalam "Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia", menyebut dukungan Arab Saudi terhadap Palestina justru semakin bersifat simbolik. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab justru lebih memosisikan Iran sebagai ancaman sekaligus musuh regional ketimbang Israel yang melakukan penindasan

terhadap Palestina. Arab Saudi lebih memprioritaskan aliansi strategisnya dengan Amerika Serikat dan Israel daripada memperjuangkan nasib rakyat Palestina. Hal ini tampak jelas dalam gelombang normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, yang ditandai dengan perjanjian Abraham Accords (2020). Begitupun dengan Sarah Leah Whitson dan Yousef Munayyer dalam artikel “The Arab World Betrays the Palestinians Again” di Foreign Policy (Munayyer, 2020) yang menyatakan negara-negara Arab saat ini memandang isu Palestina sebagai beban politik daripada kewajiban moral-ideologis. Masalah ekonomi dan stabilitas domestik lebih utama dalam kepentingan nasional mereka daripada pembebasan dan kemerdekaan Palestina. Hal itu dibuktikan pada penandatanganan normalisasi oleh UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko yang menunjukkan bukti pergeseran paradigma dari solidaritas kolektif ke pragmatisme geopolitik.

Ketika rakyat Gaza mengalami serangan besar oleh Israel seperti di tahun 2014, mayoritas negara Arab justru bersikap pasif dan bahkan menyalahkan Hamas atas eskalasi yang meningkat. Hal itu disebutkan Lamis Andoni dalam artikelnya “Fragmented Solidarity: Arab Responses to Gaza” (Andoni, 2016). Dia menggarisbawahi solidaritas Arab terhadap Palestina telah terkikis politik sektarianisme, konflik internal, dan ketergantungan pada kekuatan Barat.

Kerangka Teori

Kebijakan Luar Negeri

Dalam mengkaji kebijakan luar negeri, negara sebagai aktor yang memainkan peran penting dalam menjalankan berbagai kebijakan luar negeri dari suatu negara. Tujuan dari politik atau kebijakan luar negeri dapat dijelaskan sebagai citra kondisi negara pemerintah melalui pembuat kebijakan nasional memberikan pengaruh kepada negara lain dengan mengubah dan mempertahankan tindakan negara lain sebagai bentuk strategi negara.

Menurut John Lovell dalam mengambil kebijakan luar negeri negara dapat dilihat dari adaptasi/kepentingan sejarah, strategi, dan proses mengambil kebijakan. Dalam kebijakan luar negeri, strategi adalah rencana para pembuat kebijakan berusaha untuk memajukan kepentingan negara sendiri sementara mencegah negara lain menghalangi kepentingan tersebut (Lovell, 1970). Strategi kebijakan luar negeri menjelaskan bagaimana negara merancang dan menjalankan strategi kebijakan luar negeri dalam sistem internasional yang kompetitif dengan memperhatikan beberapa faktor utama seperti kepentingan, kemampuan, dan aliansi (Lovell, 1970). Dikarenakan khawatir akan kemampuan Sumber Daya Alam minyaknya yang tidak akan terbarukan suatu saat nanti Mohammed bin Salman selaku Putra Mahkota merumuskan Saudi Vision 2030 dengan tujuan untuk diversifikasi ekonomi Saudi. Di sisi lain Saudi sebagai penjaga Dua Tanah Suci juga ingin memiliki status sebagai negara yang maju dan modern. Dengan adanya dua kemampuan tersebut menunjukkan perlunya strategi yang bisa mewujudkan Saudi Vision 2030. Para pembuat kebijakan menggunakan jaminan sesuai dengan prioritas. Prioritas ini ditentukan berdasarkan kepentingan nasional dan penilaian terhadap keamanan kepentingannya dalam kondisi yang sedang terjadi. Dengan semakin dekatnya tahun 2030 Arab Saudi mengejar target tersebut sebagai prioritas utama meskipun dunia saat ini sedang dilanda konflik, salah satunya Palestina dan Israel. Oleh sebab itu Saudi menyusun strategi agar kepentingan nasionalnya tidak terganggu dengan konflik tersebut.

Dalam merancang strategi diperlukan kerjasama dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian. Untuk melihat keberhasilan strategi kerjasama diperlukan untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki guna untuk memperhitungkan tingkat keberhasilannya. Dengan adanya aliansi dapat mencapai keuntungan masing-masing kepentingan nasional jika tidak melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Dalam konteks membuat kebijakan luar negeri yang melibatkan dua pihak atau lebih memberikan peluang keberhasilan yang tidak hanya bergantung pada tindakannya sendiri, oleh sebab itu perlu dilakukan antisipasi untuk menghadapi strategi pihak atau

negara lain. Melalui berbagai macam aliansi dilakukan oleh Saudi. Untuk membantu mewujudkan visi 2030 Arab Saudi dan Amerika Serikat serta dengan negara lain yang dinilai mampu untuk bekerjasama dalam berbagai sektor seperti,

Dari visi tersebut Saudi memiliki tantangan dalam menghadapi permasalahan geopolitik Timur Tengah hingga ke tingkat global karena kerjasama yang dibangun dengan beberapa negara memiliki banyak kepentingan dan kompleksitas yang beragam. Hal tersebut membuat Saudi memikirkan dampak jangka pendek serta jangka panjangnya dengan konflik Palestina dan Israel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan perilaku interaksi sosial. Upaya untuk memahami makna, proses, dan konteks perilaku atau peristiwa sosial yang diamati. Penelitian kualitatif bertaruh kuat pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data yang digunakan dan dielaborasi penulis dalam tulisannya (Bakry, 2016). Metode penelitian ini didukung dengan menggunakan jenis penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi digunakan untuk menemukan ide-ide atau pemahaman awal terhadap suatu kondisi sosial yang masih sedikit diketahui (Sugiyono, 2012). Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah atau mempelajari terhadap buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 2005).

Penulis melakukan penggalian data secara tidak langsung melalui beberapa literatur yang bersumber dari jurnal maupun buku, bahkan kanal berita online lainnya. Penulis juga memanfaatkan search engine di publish or perish dalam mencari sumber data. Kata kunci yang penulis cari antara lain: "Arab Saudi" and "Israel" and "Palestina" and "2023" and "normalisasi" dengan rentang waktu antara tahun 2017 hingga tahun

2024. Dalam studi kasus penelitian ini dikarenakan konflik masih berlangsung, penulis selalu mengikuti berita terbaru yang relevan dan terpercaya dari media internasional. Oleh sebab itu penelitian eksplorasi diperlukan sebab untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana Arab Saudi menjalankan strategi politik luar negerinya terhadap kepentingan nasionalnya selama konflik Palestina dan Israel 2023.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dalam menjalankan politik luar negeri Arab Saudi terhadap konflik Palestina dan Israel tahun 2023 memiliki strategi yang kompleks dengan melibatkan beberapa negara terkait dan mengutamakan kepentingan nasionalnya, yaitu Saudi Vision 2030. Selama kepemimpinan MBS Saudi kini lebih menjalankan politik luar negeri yang lebih pragmatis. Sebelum serangan 7 Oktober 2023 diketahui bahwa MBS sudah sempat ingin menandatangani Abraham Accords untuk normalisasi hubungan dengan Israel yang sudah didahului oleh negara Arab Lain, seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain dan Sudan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perubahan sikap pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan operasi militer Israel di Palestina hingga saat ini telah menyebabkan ratusan korban jiwa mengubah pendekatan MBS secara drastis. juga menegaskan bahwa Arab Saudi tidak akan normalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya (Agencies and TOI Staff, 2024).

Karena tidak ada solusi yang terlihat untuk konflik regional dan ditengah proses normalisasi yang terhenti dengan Israel, Saudi mengubah pesannya selama setahun terakhir dari kecaman menjadi tuduhan terbuka terhadap Israel atas genosida juga mendesak lebih banyak perlindungan internasional untuk Iran (Salem, 2024). MBS melakukan strategi diplomasi luar negeri untuk menangani konflik ini dengan melakukan pertemuan bersama negara-negara lain. Arab Saudi sebagai sekutu Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina dan melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Saudi

menolak segala upaya untuk mengusir warga palestina dari tanah mereka (Georgy, 2025). Selain itu Saudi juga memberikan dukungan moral berupa bantuan kemanusiaan melalui UNRWA kepada warga Palestina. Hal tersebut menunjukkan sikap secara eksplisit bahwa Saudi terus mendorong kedaulatan Palestina untuk bebas dari penindasan Israel.

Selain bantuan di atas, Saudi juga menjalankan manuver politik secara langsung kepada Suriah, Iran, Houthi, dan Amerika Serikat. Setelah 12 tahun putusnya hubungan diplomatik antara Suriah dan Saudi, pada 2023 lalu menjadi titik awal menandai baiknya hubungan diplomasi kedua negara. Puncak rekonsiliasi pada 2023 ketika Presiden Suriah Assad menghadiri KTT Liga Arab di Saudi (Reuters, 2023b). Arab Saudi tampak cukup aktif dalam mengupayakan normalisasi dengan Suriah sejalan dengan tren pemulihan hubungan regional terkini. Negara tersebut menjadi pemimpin secara de facto dalam proses normalisasi dengan banyak negara Timur Tengah lain mengikuti jejaknya.

Proses normalisasi tersebut berlanjut hingga pada pertemuan Mei 2025. Ketika Trump mengunjungi Arab Saudi dan di sela-sela kunjungan tersebut, terjadi kesepakatan pertemuan antara Trump, MBS, Presiden baru Suriah al-Shara dan Presiden Turki Erdogan melalui sambungan telfon. Dalam pertemuan tersebut Trump meminta Suriah untuk bergabung menandatangani Abraham Accords dan sebaliknya al-Shara meminta imbalan dengan mencabut sanksi yang sudah lama diberikan Amerika dan negara Barat lain kepada Suriah telah membuat Suriah memiliki keterbatasan dalam menjalankan urusan negaranya (State, n.d.). Kunjungan Trump ke Saudi saat itu juga telah berhasil membawa pulang investasi sebesar 600 miliar US dolar dan Saudi meminta Trump untuk mencabut sanksi Suriah (Yousef Saba and Gram Slattery and Pesha Magid and Nafisa Eltahir, 2025).

Trump mengunjungi Arab Saudi Mei 2025 dikarenakan merasa terdesaknya posisi finansial Amerika Serikat setelah pengumuman tarif yang mengacaukan pasar ekonomi dunia. Melihat keadaan Amerika yang cukup terdesak dengan situasi dan kondisi negaranya serta konflik di Palestina dan Ukraina yang tidak kunjung selesai membuat

Trump mencari cara agar kebijakan “American First” dapat berjalan dengan baik. Amerika mencari bantuan yang bisa membantu negaranya untuk menstabilkan kondisi ekonominya. China yang menduduki kawasan Asia membuat Trump tidak memilih negara-negara Asia sebagai teman untuk saat ini. Di Eropa masih sangat membutuhkan Rusia sebagai pemasok dalam sektor energi membuat Trump juga tidak memilih kawasan tersebut. Sedangkan di Timur Tengah Trump melihat Saudi sebagai sekutu dan memiliki kepentingan Saudi Vision 2030 dan belum menandatangani Abraham Accords. Hal tersebut membuat Trump mengambil kesempatan untuk kerjasama guna mendukung kepentingannya.

Selain itu Arab Saudi juga telah normalisasi hubungan Iran dan proksinya yaitu Houthi. Hal tersebut dilakukan guna untuk menghentikan perang di Timur Tengah. China berperan sebagai fasilitator untuk proses normalisasi ini. China sebagai sekutu Iran dan Saudi sebagai sekutu Amerika telah menunjukkan langkah yang signifikan atas polarisasi regional Timur Tengah. Bagi Saudi dan Iran perang bukanlah jalan terbaik untuk mengambil keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama dapat dibangun dengan baik untuk lebih mempertimbangkan kepentingan nasional. Sebab perlu diketahui semua manuver politik yang dilakukan oleh Saudi memiliki keterlibatan dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Dengan semakin dekatnya tahun 2030 Arab Saudi mengejar targetnya dan ketika sedang mengejar target tersebut konflik Israel dan Palestina kembali pecah dan kemungkinan dinilai akan menghambat visi Saudi ini. Oleh sebab itu Saudi merangkul semua pihak untuk bisa mewujudkan visinya ini dengan tepat waktu dengan tetap memprioritaskan kemerdekaan Palestina.

Pembahasan

Politik Luar Negeri Arab Saudi

Februari 2025 Arab Saudi menegaskan bahwa secara konsisten untuk mendukung solusi dua negara dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina merdeka (Alashray, 2025). Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang

sangat berseberangan dengan Hamas memiliki tekad untuk normalisasi dengan Israel agar bisa menciptakan perdamaian bagi regional khususnya Palestina. Sikap MBS ini mengundang respon publik dan tantangan internal Arab Saudi.

Kebijakan Arab Saudi terhadap konflik Palestina-Israel sejak awal mengalami evolusi dalam beberapa dekade terakhir. Evolusi kebijakan yang setelah wafatnya Raja Faisal bin Abdul Aziz mengalami pendekatan yang lebih pragmatis seperti adanya Arab Peace Initiative pada tahun 2002 (“The 2002 Arab Peace Initiative,” n.d.) . Sikap Saudi terhadap konflik dua negara ini di era setelah Raja Faisal wafat lebih menunjukkan sikap yang lebih diplomatis dan realistis dalam menghadapi kompleksitas konflik. Terlebih saat kepemimpinan politik luar negeri Saudi saat ini yang dipimpin oleh MBS mengedepankan kepentingan ekonomi dan lebih pragmatis. Perubahan sikap pasca serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan operasi militer di Gaza yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa mengubah pendekatan MBS secara drastis yang sebelumnya hampir normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords (Jazeera, 2023). MBS juga mengutuk tindakan Israel tersebut sebagai “genosida” (Asem, 2024).

Pada November 2023 Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Arab dan Islam yang membahas agresi Israel terhadap Palestina. Dalam pertemuan tersebut para pemimpin Arab dan Islam menegaskan perjuangan dan dukungan bagi rakyat Palestina atas kedaulatan penuh negara Palestina dan menolak segala keputusan maupun tindakan Israel atas pendudukan kolonialnya di Palestina (MOFA Saudi Arabia, 2024). Dibawah kepemimpinan MBS melakukan strategi diplomasi luar negeri untuk menghentikan konflik ini. Arab Saudi menekankan solusi dua negara dan mengadakan pertemuan dengan Uni Eropa serta negara Arab lainnya untuk penyelesaian konflik (Mat, 2024).

Selain melalui diplomasi Saudi memberikan dukungan moral melalui bantuan kemanusiaan kepada Palestina dengan menggunakan pengaruhnya di dunia internasional untuk menekan Israel dan sekutunya. Arab Saudi memberikan sumbangan sebesar 2 juta US dolar kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East (UNRWA) untuk mendukung pengungsi Palestina dengan memperkuat kemampuan UNRWA dalam menanggapi pembangunan dan kebutuhan kemanusiaan Palestina (UNRWA, 2023). Selanjutnya pada tahun 2024 Saudi telah memberikan bantuan keuangan bulanan sebagai komitmen jangka panjangnya yang telah mencapai lebih dari 5,3 miliar US dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan Palestina (News, 2024). Kedua langkah Saudi di atas menunjukkan bahwa Saudi mendorong kedaulatan Palestina dan memberikan segala bentuk dukungan bantuan untuk Palestina dari segala penindasan yang dilakukan Israel.

Manuver Politik Arab Saudi

Di tengah terjadinya konflik Palestina dan Israel kondisi Timur Tengah mengalami kondisi yang fluktuatif. Berbagai negara di Timur Tengah saling serang dan menyerang satu sama lain demi kepentingannya. Saudi sendiri memiliki keterkaitan urusan dengan negara-negara Timur Tengah. Perjalanan ketegangan yang panjang antara Arab Saudi dan Iran telah mempengaruhi pola dan proksi geopolitik Timur Tengah yang disebabkan karena perbedaan ideologi antara Sunni dan Syiah terlebih sejak revolusi Iran 1979 (Farras, 2020). Salah satu proksi Iran yaitu Houthi di Yaman.

Selama lebih dari tujuh tahun sejak 2015 perang lintas udara Houthi telah berkembang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, penguatan teknologi, pergeseran aliansi regional dan pertimbangan militer yang strategis. Pada tahun 2015 ketika pemberontak berhasil mengambil alih pemerintahan yang dipimpin Presiden Hadi, Arab Saudi memimpin misi intervensi yang melibatkan beberapa negara seperti, Yordania, Mesir, Maroko dan Sudan (Priambodo, 2017). Serangan udara Houthi mengawali strategi pemaksaan terhadap Saudi yang ditandai penggunaan rudal untuk membalas serangan udara Saudi dengan tembakan. Tahun 2022 Utusan Khusus PBB untuk Yaman berhasil negosiasi gencatan senjata yang didahului oleh serangan Houthi lintas batas skala besar dengan menargetkan beberapa lokasi di distrik Asir dan Jizan

dengan rudal balistik, sementara rudal jelajah menargetkan Riyadh dan Saudi Aramco di Jeddah (Jones, Thompson, Ngo, Bermudez Jr., & McSorley, 2021).

Sementara Iran dan Saudi yang telah lama bersitegang berusaha didamaikan oleh China. Hal tersebut ditunjukkan ketika satu tahun setelah Presiden Xi Jinping bertemu MBS tahun 2022 menunjukkan terjadi pergeseran besar dalam geopolitik Timur Tengah dengan memfasilitasi normalisasi kedua negara dan bertindak sebagai mediator (Harsono & Ceria, 2024). Xi Jinping berbicara melalui telfon dengan MBS membahas persoalan mendukung pembicaraan lanjutan antara Saudi dan Iran yang menekankan pentingnya hubungan strategis antara Saudi sebagai eksportir terbesar dunia dan pusat ekonomi China sebagai mitra dagang utama negara-negara Teluk (Reuters, 2023a). Pertemuan Iran dan Saudi pada Maret 2023 setuju untuk memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali Kedutaan Besar setelah 7 tahun memiliki ketegangan diantara kedua negara (Baghernia, 2024). Pencapaian tersebut disepakati di China selama acara Kongres Rakyat Nasional.

Inisiatif Saudi dalam tingkat global bersama dengan negara-negara Eropa dan Islam meluncurkan “The Global Alliance for the Implementation of a Palestinian State and a Two-State Solution” untuk mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka (Lederer, 2024). Pada September 2024 dilakukan pertemuan pada sela-sela sidang PBB dengan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Norwegia dan Arab Saudi membahas dan mempersiapkan masa depan setelah perang di Palestina dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara Palestina secara merdeka.

Saudi juga telah memfasilitasi banyak pertemuan antara para pejabat dalam beberapa tahun terakhir serta menjadi tuan rumah pertemuan puncak Liga Arab pertama yang dihadiri Presiden al-Assad di tahun 2023. Hubungan Arab Saudi dan Suriah sempat retak dikarenakan naiknya al-Assad sebagai pemimpin baru Suriah pada 2011 yang diketahui bahwa al-Assad merupakan proksi syiah Iran. Pada Maret 2024 Menteri Luar Negeri Saudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah di Riyadh untuk melanjutkan diskusi yang menjadi bagian dari upaya diplomatik berkelanjutan untuk

membahas solusi politik terkait krisis Suriah dan normalisasi hubungan Saudi-Suriah (Report, 2024).

Dalam kunjungan Donald Trump ke Saudi pada Mei 2025 bertemu dengan Presiden baru Suriah al-Shara. Sela-sela kunjungan tersebut diantara Trump, MBS, al-Shara dan melalui sambungan telfon Presiden Turki Erdogan membahas hubungan kerjasama antar negara. Trump memberikan daftar kesepakatan yang diminta agar dilakukan oleh al-Shara, diantaranya menandatangani Abraham Accords dengan Israel, memberi tahu semua teroris asing untuk meninggalkan Suriah, mendeportasi teroris Palestina, membantu Amerika Serikat mencegah kebangkitan kembali kelompok ISIS dan memikul tanggung jawab atas pusat-pusat penahanan ISIS di timur laut Suriah (Report, 2024).

Saudi yang menjadi fasilitator dalam pertemuan tersebut menunjukkan fokus yang jelas untuk membangun stabilitas Suriah dan mencegah negara tersebut menjadi pangkalan operasional bagi kelompok bersenjata yang dapat mengancam keamanan regional (Salami, 2025). Saudi saat ini sedang melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap peluang tiap negara dengan berupaya memverifikasi pembentukan kondisi stabil penerapan langkah-langkah reformasi minimum, pencabutan sanksi Barat dan konfirmasi jaminan bahwa aktor lain khususnya Iran dan Hizbullah tidak akan menghalangi inisiatifnya (Khatib, 2025). Hanya setelah kondisi ini terpenuhi Saudi bermaksud untuk memulai investasi yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisinya dan memperluas pengaruh di Suriah dan Lebanon. Setelah rekonsiliasi pada 2023 perubahan sikap Saudi tentang peran di Suriah memberikan alternatif kepada Assad terhadap Iran untuk mendiversifikasi kemitraan serta mengejar peluang rekonstruksi Suriah setelah gempa bumi 2023 (Alhajj, 2023).

Kunjungan Trump ke Saudi pada Mei 2025 dinilai memiliki keterkaitannya dengan Trump Tariff. Pada awal-awal kepemimpinan Trump periode kedua telah mengumumkan serangkaian tarif dengan alasan untuk meningkatkan manufaktur dan melindungi pekerjaan di Amerika Serikat (House, 2025). Namun dari tarif tersebut menimbulkan

kekacauan ekonomi dunia dan banyak yang berpendapat bahwa akan membuat produk menjadi mahal (Mark John, 2025). Pengumuman tersebut juga menyebabkan fluktuasi di pasar saham global dan menyebabkan nilai dolar Amerika Serikat jumlahnya turun (Wee, 2025). Kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Trump juga memiliki implikasi tidak langsung terhadap kontribusi Amerika Serikat pada International Monetary Fund dan World Bank. Perubahan pendekatan terhadap institusi multilateral bisa disebabkan karena adanya kebijakan luar negeri Trump “American First” yang cenderung lebih mementingkan kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri melalui kesepakatan bilateral dibanding kesepakatan multilateral.

Saudi Vision 2030

Vision 2030 adalah rencana ambisius untuk merombak kehidupan sehari-hari di Saudi Arabia, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata dan hiburan. Dalam kenyataannya Saudi memiliki visi adalah untuk memperbaiki citra internasional Saudi Arabia yang berusaha untuk memproyeksikan citra baru yang modern dan terbuka, akan tetapi banyak suara dari lokal yang diabaikan. Reformasi ini lebih banyak menguntungkan untuk menarik investor asing daripada memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri (Bsheer, 2020). Dalam Saudi Vision 2030 memiliki empat pilar utama yakni yang pertama menjadi dunia Arab dan Islam yang maksudnya adalah Arab Saudi berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai pusat spiritual bagi umat Muslim, dengan fokus pada pengelolaan dan pelayanan di Dua Masjid Suci, Masjid Al Haram dan Masjid Nabawi. Pilar kedua yakni kekuatan investasi global yang artinya Arab Saudi berencana memanfaatkan kemampuan investasi yang dimiliki untuk mendiversifikasikan ekonomi dan mulai mengurangi ketergantungan pada minyak. Pilar terakhir adalah hubungan strategis yang menghubungkan tiga benua adalah Arab Saudi ingin memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis untuk menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Dalam pilar ini melibatkan adanya pengembangan di infrastruktur dan sistem transportasi

untuk mendukung perdagangan dan pariwisata (Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, 2020).

Arab Saudi menunjukkan tujuan utama yang jelas untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang maju dan bisa beradaptasi dengan keadaan global. Dalam menjalankan visinya tersebut Saudi menjalin kerja sama dengan negara-negara yang dikategorikan maju dan adaptif yaitu Amerika Serikat dan Cina. Hal tersebut diperlukan karena Arab Saudi juga mempertimbangkan stabilitas nasionalnya yang tidak ingin berpihak kepada siapapun melainkan dukungan dari seluruh pihak untuk memuluskan visinya ini. Dalam menjalankan Saudi Vision ini proyek yang paling menonjol salah satunya ialah akan kekuatan investasi global. Arab Saudi tidak ingin lagi mengandalkan minyak dalam perputaran ekonomi negaranya sebab Arab Saudi merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai rentier state terbesar di dunia karena Saudi menjadi negara yang pendapatan nasionalnya memang bergantung penuh atau sebagian besar berasal dari kekuatan sumber daya alam lokal negara tersebut (Derajat & Kurniawan, 2021). Hanya sebagian kecil pendapatan Arab Saudi yang berasal dari pajak serta retribusi (Stenslie, 2018). Oleh sebab itu Arab Saudi melalui Kerajaan mencoba membangun kerjasama melalui diversifikasi ekonomi dengan membangun kota atau peradaban yang disebut “The Line” — kota kognitif yang membentang sepanjang 170 kilometer, dari pegunungan NEOM yang epik melintasi lembah gurun yang inspiratif hingga Laut Merah yang indah. Sebuah mahakarya arsitektur cermin yang menjulang 500 meter di atas permukaan laut, tetapi memiliki lebar 200 meter yang menghemat lahan (NEOM, n.d.) THE LINE mendefinisikan ulang konsep pembangunan perkotaan dan seperti apa kota-kota masa depan nantinya (NEOM, n.d.)

Arab Saudi berusaha untuk memperkuat citra sebagai negara stabil dan moderat serta posisinya di panggung internasional untuk menarik investasi internasional melalui peningkatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara dalam membangun proyek stabilitas. Ini termasuk keterlibatan dalam organisasi internasional dan kerjasama

bilateral yang lebih aktif, yang merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan citra negara sebagai pusat moderasi Islam (Mahernei, 2021).

Kesimpulan

Dengan banyaknya kerjasama yang dibangun oleh negara-negara Barat dan dengan adanya Saudi Vision 2030 ini bisa melihat sebenarnya apa dan bagaimana kepentingan nasional yang dimiliki oleh Arab Saudi. Dalam kerja sama untuk mewujudkan Saudi Vision ini merupakan bentuk normalisasi hubungan diplomatik yang membawa implikasi bagi negara-negara Arab yang melakukan kesepakatan. Secara umum dampak yang diperoleh oleh negara-negara Arab dari kesepakatan tersebut adalah keuntungan ekonomi

Arab Saudi sebagai negara yang cukup memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat memiliki posisi yang cukup bimbang yang dikarenakan adanya beberapa faktor. Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dengan salah satu tujuannya untuk menggagalkan normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Melihat kondisi akibat perang yang kompleks Arab Saudi menyoroti krisis kemanusiaan yang cukup berat terutama di Jalur Gaza dan menyerukan akses kemanusiaan yang lebih baik serta penghentian segera dari semua bentuk kekerasan. Saudi telah menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya merupakan prasyarat utama untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai bentuk wujud nyata dukungannya terhadap Palestina Arab Saudi mengambil langkah inisiatif diplomatiknya dengan melakukan beberapa manuver politik kepada negara-negara terkait yang bertujuan untuk menggalang dukungan internasional untuk mendirikan negara Palestina. Inisiatif ini tentunya melibatkan negara-negara di Timur Tengah atau Arab, Muslim, serta mitra Eropa, dan berusaha untuk menciptakan rencana yang dapat diandalkan dalam mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif.

Arab Saudi menyerukan negara-negara di seluruh dunia untuk secara terbuka mendukung pengakuan negara Palestina dan bergabung dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini. Mereka ingin memperkuat konsensus internasional mengenai pengakuan Palestina. Kekerasan yang terjadi di Palestina juga terus tersorot oleh dunia internasional dan mengundang aksi simpati dari berbagai kalangan di dunia, termasuk masyarakat sipil. Seiring dinamika politik yang terus terjadi hingga saat mendatang, belum dapat dipastikan bagaimana pandangan hubungan internasional yang pasti dari Arab Saudi dalam menghadapi konflik antara Palestina dan Israel ini.

Akan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di Palestina Arab Saudi memutuskan untuk menunda rencana normalisasi hubungan dengan Israel karena beberapa alasan serta dampaknya terhadap opini publik dan kebijakan luar negeri Kerajaan Arab Saudi. Dalam konteks ini Arab Saudi merasa bahwa melanjutkan pembicaraan normalisasi dengan Israel akan dianggap sensitif dan tidak etis terutama mengingat dukungan historis mereka terhadap Palestina. Arab Saudi memiliki komitmen kuat untuk mendukung hak-hak Palestina. Penundaan ini mencerminkan keinginan Arab Saudi untuk menjaga solidaritas Arab dan memastikan bahwa setiap langkah menuju normalisasi tidak mengabaikan kebutuhan dan aspirasi rakyat Palestina. Meningkatnya sentimen anti-Israel di masyarakat Arab juga menjadi faktor penting. Dalam penundaan ini tentunya mengundang opini publik dan berpengaruh ke stabilitas domestik. Tindakan militer agresif Israel terhadap Palestina dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat Saudi dan mengancam stabilitas sosial dan politik negara tersebut. Normalisasi tanpa kemajuan signifikan terhadap persoalan Palestina dinilai berisiko menimbulkan ketidakpuasan warga Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Situasi ini juga mendorong Arab Saudi untuk menjalin dialog dengan Iran yang merupakan pendukung utama Hamas. Dialog ini bertujuan untuk mencegah peningkatan kekerasan lebih lanjut di kawasan tersebut. Dalam konteks ini Arab Saudi berusaha untuk menyeimbangkan hubungan internasionalnya sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam mengakses data terkait terhadap aktor kebijakan luar negeri Arab Saudi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam dengan menggunakan pendekatan yang variatif, seperti wawancara dengan ahli kebijakan Timur Tengah, diplomat atau tokoh organisasi internasional. Selain itu, perluasan kajian ke aspek lain seperti pengaruh kebijakan domestik Arab Saudi terhadap isu ini.

Referensi

- Agencies and TOI Staff. (2024). Saudi crown prince says Riyadh won't recognize Israel without Palestinian state.
- Al-Rasheed, M. (2021). *Salman's Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia*.
- Alashray, Y. E. and E. (2025, February). Saudi Arabia, in swift response to Trump, says no ties with Israel without Palestinian state.
- Alhaji, T. (2023). The Syrian Regime and the Spoils of the Earthquake.
- Andoni, L. (2016). Fragmented Solidarity: Arab Responses to Gaza. *Journal of Palestine Studies*.
- Asem, S. (2024). Saudi Arabia's Mohammed bin Salman says Israel committing genocide in Gaza.
- Baghernia, N. (2024). China's Marginal Involvement in the 2023 Iran-Saudi Arabia Reconciliation. *Asian Affairs*, 55(1), 34–51.
<https://doi.org/10.1080/03068374.2024.2329615>
- Bsheer, R. (2020). The Limits of Belonging in Saudi Arabia. *International Journal of Middle East Studies*, 52(4), 748–753. <https://doi.org/10.1017/S002074382000104X>
- Derajat, A. Z., & Kurniawan, T. (2021). Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 9(1), 39–50. <https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465>
- Farras, A. N. (2020). Balance of Power Dalam Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman yang Terjadi Pasca Arab Spring. *Journal of International Relations*, 6(1), 144–155.
- Georgy, M. (2025). Saudi Arabia , in swift response to Trump , says no ties with Israel without Palestinian state.
- Harsono, R. N., & Ceria, S. L. (2024). Normalization of Diplomatic Relations Between Saudi Arabia and Iran : A Rationality Analysis of Saudi Arabia ' s Foreign Policy. *Global-Local Interactions: Journal of International Relations*, 4(2), 84–96.
- House, T. W. (2025). Fact Sheet: President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security – The White House.
- Jazeera, A. (2023, September). Saudi Crown Prince MBS says Israel Normalisation Getting 'closer.'

- Jones, S. G., Thompson, J., Ngo, D., Bermudez Jr., J. S., & McSorley, B. (2021). The Iranian and Houthi War against Saudi Arabia. *Center for Strategic and International Studies*.
- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine*.
- Khatib, L. (2025). How Saudi Arabia and the US might reset the Middle East. *Chatham House, The Royal Institute of International Affairs*.
- Lederer, E. M. (2024). Europeans, Arab and Muslim nations launch new initiative for independent Palestinian state.
- Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Mahernei. (2021). Saudi Vision 2030 Dalam Negara Arab Saudi.
- Mark John, F. C. and L. K. (2025). Trump tariffs pile stress on ailing world economy.
- Mat, N. K. A. B. (2024). Responses of Gulf States to the Palestine-Israel Conflict in Post 7th October 2023. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, (2), 82–105.
- MOFA Saudi Arabia. (2024). His Highness the Foreign Minister: A Two-State Solution is the Only Path to Achieving a Just and Lasting Peace in the Region.
- Munayyer, S. L. W. and Y. (2020). The Arab World Betrays the Palestinians Again. *Foreign Policy*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- NEOM. (n.d.). THE LINE: a revolution in urban living.
- News, A. (2024). Saudi Arabia Announces Monthly Financial Support to Address Humanitarian Situation in Gaza.
- Priambodo, S. (2017). Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(1), 205–216.
- Report, S. G. (2024). Saudi FM meets Syrian counterpart in Riyadh.
- Reuters. (2023a). China's Xi speaks with Saudi crown prince, supports Saudi-Iran talks.
- Reuters. (2023b). Syria's Assad receives warm welcome at Arab summit after years of isolation.
- Salami, M. (2025). Saudi Arabia's Cautious Approach to the Syrian Kurds: Balancing Stability and Geopolitical Interests.
- Salem, M. (2024). Saudi crown prince accuses Israel of committing ' collective genocide ' in Gaza.
- State, U. S. D. of. (n.d.). Syria Sanctions.
- Stenslie, S. (2018). The end of elite unity and the stability of Saudi Arabia. *Washington Quarterly*, 41(1), 61–82. <https://doi.org/10.1080/01636660X.2018.1445360>
- Sugiyono, P. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The 2002 Arab Peace Initiative. (n.d.).
- UNRWA. (2023). Saudi Arabia Announces US\$ 2 Million Contribution to UNRWA in Support of Palestine Refugees | UNRWA.
- Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. (2020). Government of Saudi Arabia. *Government*

of Saudi Arabia, 1–85.

Wee, R. (2025). Mighty U.S. dollar feels heat as Trump's tariffs spark trade turmoil.

Yousef Saba and Gram Slattery and Pasha Magid and Nafisa Eltahir. (2025). Trump says US to lift Syria sanctions, secures \$600 billion Saudi deal.